

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa kepentingan aktor dalam kontestasi pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor, baik dari institusi pemerintah maupun non-pemerintah, yang memiliki kepentingan beragam terhadap hasil data yang dihasilkan Di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Sosial berperan sebagai insitusi utama dalam koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan DTKS. Berikut aktor kunci dalam pengumpulan DTKS beserta kepentingannya:

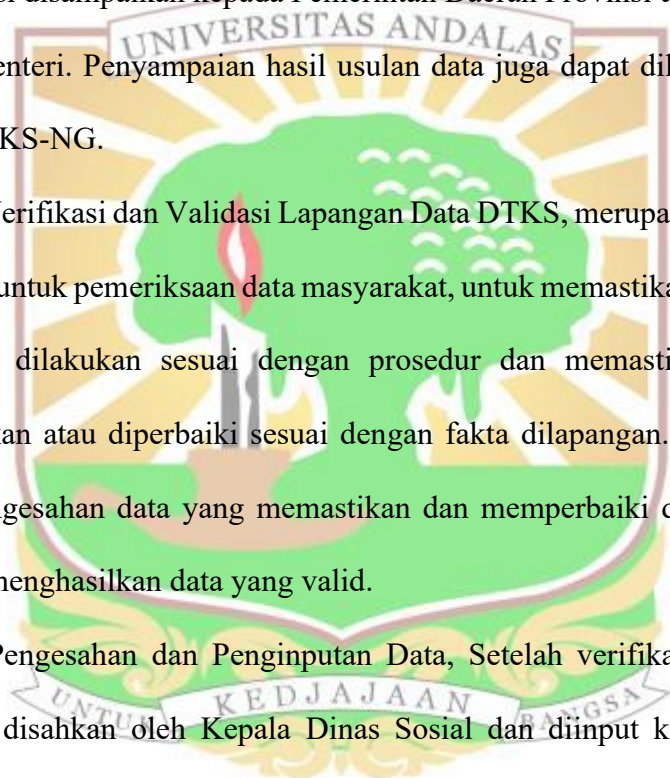
- a. Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Pemerintah Nagari
- c. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- d. Masyarakat

Kontestasi antar aktor dalam proses pendataan DTKS terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari identifikasi awal hingga validasi akhir. Dalam praktiknya di Kabupaten Pesisir Selatan, proses ini kerap menjadi arena kontestasi antar aktor, yang masing-masing membawa kepentingan, posisi, dan strategi tersendiri. Adapun tahapan-tahapannya diantara lain:

- a. Tahapan Sosialisasi dan Kooordinasi Awal dalam Pengumpulan DTKS, pada proses perencanaan perencanaan Pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan ingin mencapai data yang berkualitas, yang datanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan bantuan sosial.

- b. Tahapan Musyawarah Nagari dan Pengusulan Data DTKS, proses usulan data melalui musyawarah desa/nagari kemudian disampaikan kepada bupati melalui Dinas Sosial daerah kabupaten/kota. Dinas Sosial kemudian melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data, kemudian data yang sudah diverifikasi dan validasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diteruskan kepada Menteri. Penyampaian hasil usulan data juga dapat dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG.
- c. Tahapan Verifikasi dan Validasi Lapangan Data DTKS, merupakan proses yang dilakukan untuk pemeriksaan data masyarakat, untuk memastikan proses usulan data yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan memastikan data yang dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan. Dan kemudian proses pengesahan data yang memastikan dan memperbaiki data masyarakat sehingga menghasilkan data yang valid.
- d. Tahapan Pengesahan dan Penginputan Data, Setelah verifikasi selesai, data kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Sosial dan diinput ke dalam sistem SIKS-NG oleh operator dinas atau operator nagari. Data yang masuk ke sistem ini akan digunakan pemerintah pusat untuk menetapkan daftar penerima bantuan sosial.



4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, peneliti dapat memberikan saran kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran-saran yang dimaksud diantaranya berikut ini:

Untuk aktor kunci, hendaknya lebih menjaga independensi dan integritas terhadap penerima bantuan. Bisa saja berpotensi terjebak dalam kedekatan emosional atau tekanan dari elite lokal, dan juga menolak intervensi dan melaporkan tekanan dari pihak manapun ke Dinas Sosial. Serta hubungan antara Dinas Sosial dengan Pemerintah Nagari harus lebih baik, agar Pengumpulan DTKS ini dapat terealisasi di lapangan dengan baik.

Kepada masyarakat, sebagai penerima manfaat potensial yang memiliki kepentingan langsung. Namun, masyarakat juga perlu diberdayakan agar tidak hanya menuntut, tetapi juga memahami prosesnya. Seperti diberikan edukasi dan pemahaman tentang fungsi dari DTKS, bahwa tidak semua warga miskin otomatis masuk. Dan dilibatkan dalam proses verifikasi terbuka agar merasa memiliki data tersebut, dan juga diberi akses menyampaikan pengaduan atau keberatan secara terbuka dan berisiko.

